

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, baik dari sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan. Pemerintah Indonesia memandang semua potensi sumber daya alam tersebut sebagai modal untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengeksploitasinya. Indonesia adalah termasuk negara berkembang yang dianugerahi wilayah berkepulauan. Hal ini kemudian menyebabkan ketimpangan antardaerah, baik dari segi perekonomian, infrastruktur dan sebagainya. Oleh karena itu, maka pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pelayanan dan jasa, seperti pelabuhan, bandara, jalan, gedung dan sebagainya dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah di Indonesia.

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan pembangunan infrastruktur juga meningkat. Indonesia yang terus melakukan pembangunan tersebut membutuhkan semen sebagai material konstruksi selain pasir dan kerikil. Kebutuhan akan semen selama ini sudah ditopang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan. Selain badan usaha negara, kebutuhan semen dalam negeri juga ditopang oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Kabupaten Pati, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah, dipandang sebagai lokasi yang strategis untuk memulai usaha

pertambangan baru dengan keberadaan Pegunungan Kendeng Utara. Memiliki jenis tanah berupa karts, Pegunungan Kendeng Utara dianggap memiliki sumber bahan baku melimpah untuk keperluan produksi semen. Oleh karena itu, dalam kurun waktu antara Tahun 2006 hingga Tahun 2015, dua perusahaan semen silih berganti ingin mendirikan pabrik semen di wilayah Kabupaten Pati bagian selatan.

Pada Tahun 2010, isu rencana pendirian pabrik semen dimunculkan kembali ke permukaan (sebelumnya oleh PT. Semen Gresik pada Tahun 2006 yang akhirnya gagal oleh gugatan masyarakat di pengadilan) oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa melalui anak perusahaannya, yaitu PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS). Pendirian pabrik semen direncanakan dibangun di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) pun kembali menunjukkan eksistensi mereka dalam melakukan gerakan tolak pabrik semen.

Dalam kasus pendirian pabrik semen antara PT. Sahabat Mulia Sakti dengan masyarakat di Kabupaten Pati, aktor yang terlibat dari masyarakat kontra bukan hanya dari JMPPK. Banyak komunitas-komunitas lain seperti Serikat Petani Pati (SPP), Likra dan sebagainya yang terlibat, akan tetapi peran yang ditampilkan tidak sebesar yang dilakukan oleh JMPPK. Peran JMPPK dalam proses perkembangan konflik pabrik semen tersebut sangat signifikan. Adapun peran atau upaya yang telah dilakukan oleh JMPPK dalam konflik pabrik semen hingga tercapainya resolusi pada Tahun 2015 akan dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:

1. JMPPK yang sudah terbentuk sejak berkonflik dengan PT. Semen Gresik, terus menunjukkan eksistensi mereka dalam melakukan penolakan pabrik semen sampai dengan PT. Sahabat Mulia Sakti dengan melakukan berbagai upaya, seperti aksi jalan kaki, aksi teatrikal, demonstrasi dan sebagainya.
2. Melalui gerakan tolak pabrik semen, JMPPK selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang bahaya kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan apabila ada pabrik semen beserta kegiatan penambangannya. Selain itu, JMPPK beserta masyarakat kontra juga memasang atribut penolakan pabrik semen berupa spanduk, stiker, kaos, poster dan sebagainya. Di samping itu, JMPPK selalu aktif mengkampanyekan pelestarian lingkungan dan gerakan tolak pabrik semen melalui website dan media sosial, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.
3. JMPPK selalu aktif terlibat dalam setiap agenda dialog yang berkaitan dengan pabrik semen dibandingkan dengan komunitas lain. Pun demikian dengan pihak pemerintah yang memandang JMPPK memiliki peran lebih dalam konflik pabrik semen sehingga selalu diundang dalam setiap agenda. Meskipun demikian, berbagai masukan yang diberikan oleh pihak JMPPK tidak pernah benar-benar dijadikan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan. Sehingga dalam setiap agenda dialog, mediasi dan sebagainya tidak pernah menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak. Hal ini dikarenakan para aktor utama dalam konflik pabrik semen tetap memegang prinsip mereka masing-masing dengan kuat.

4. JMPPK juga berusaha melobi DPRD Kabupaten Pati dalam rapat pleno, agar mengubah status Pegunungan Kendeng Utara sebagai kawasan geologi. Sehingga dengan status tersebut, secara langsung akan menggugurkan berbagai upaya eksploitasi terhadap kawasan Pegunungan Kendeng Utara.
5. Banyaknya jumlah dukungan yang mengalir ke masyarakat kontra yang dimotori oleh JMPPK juga secara tidak langsung menambah jumlah massa yang ikut tergabung dalam gerakan tolak pabrik semen. Hal ini kemudian mendorong munculnya aksi solidaritas kepada saudara-saudara yang ada di Kabupaten Rembang yang sedang mengalami nasib serupa.
6. Dalam upaya mencapai resolusi yang diinginkan, JMPPK bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka melayangkan gugatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati atas dikeluarkannya Surat Izin Lingkungan untuk perusahaan semen. JMPPK juga selalu aktif dalam mengawal jalannya setiap persidangan. Hingga sampai pada sidang pembacaan putusan oleh hakim, JMPPK melakukan aksi jalan kaki dari Kabupaten Pati hingga ke Kota Semarang.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh JMPPK dari awal kemunculan rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti akhirnya membuahkan hasil dengan dimenangkannya gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat atas Pemerintah Daerah yang mengharuskan Bupati Pati mencabut surat izin lingkungan yang sebelumnya telah dikeluarkan.

IV.2. Saran

Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan lebih kepada setiap Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati memegang peranan kunci dalam kasus konflik pabrik semen karena pemerintah juga yang memiliki wewenang atas daerahnya. Di satu sisi, adanya otonomi daerah tersebut kemudian mewajibkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk berusaha membangun serta meningkatkan kesejahteraan di segala bidang kehidupan di daerahnya.

Di sisi lain, proses pembangunan yang dilakukan seringkali tidak tepat sasaran karena pemerintah kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konflik pabrik semen antara masyarakat dengan PT. Sahabat Mulia Sakti, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati harus peka terhadap permasalahan yang dialami masyarakatnya. Apabila masyarakat kontra bersikukuh bahwa pabrik semen akan memberikan lebih banyak dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, budaya dan politik, maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mampu mencari solusi alternatif lain sebagai pondasi jangka panjang untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati.

Pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Jika tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah konflik. Secara sosial budaya, masyarakat di Pati Selatan, khususnya di Kecamatan Tambakromo, Kayen dan Sukolilo tidak menginginkan adanya

perubahan yang mempengaruhi sistem tata sosial dan budayanya. Sedangkan pihak pro akan terus memberikan dukungan kepada investor agar dapat mendirikan pabrik semen di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen yang bertujuan untuk memanfaatkan tanah kars pegunungan Kendeng sebagai bahan baku semen dan bisa memberikan lapangan kerja kepada penduduk sekitar calon lokasi pabrik, sehingga dampak positif dari pembangunan daerah dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.